

Laporan Penelitian



JUDUL :

**Implementasi Program Bantuan Sosial Kementerian Pertanian
Tahun Anggaran 2016 di Kelurahan Koya
Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa**

Oleh :

Cynthia Maria Siwi

Ronald Jolly Pongantung

Jeane Mantiri

FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TERBUKA

2018

1

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II Landasan Teori	
2.1. Kebijakan Publik.....	
2.2. Implementasi Kebijakan	
2.3. Model Implementasi Kebijakan.....	
2.4. Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian	
BAB III Metode Penelitian	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	
3.2. Fokus Penelitian.....	
3.3. Lokasi Penelitian.....	
3.4. Sumber Data.....	
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	
3.6. Analisis Data.....	
3.7. Keabsahan Data.....	
BAB IV Hasil Penelitian	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	
4.1.1. Sejarah Kelurahan Koya.....	
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	
4.2.1. Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Kelurahan Koya Kecamatan	

Tondano Selatan.....	
4.3. Pembahasan.....	
4.3.1 Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.....	
BAB V Kesimpulan Dan Saran	
5.1 Kesimpulan.....	
5.2 Saran.....	
Daftar Pustaka.....	

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menganalisis tentang bagaimana Implementasi Program Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa. Konsep teori yang digunakan adalah konsep dari Riant Nugroho dengan lima prinsip dalam implementasi kebijakan publik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena dengan penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah juga lebih menekankan pada proses pencarian makna, pengungkapan makna, dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan tujuan agar masalah yang akan dikaji lebih mendalam, dan apa adanya serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti terhadap fakta yang muncul. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian Implementasi Program Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun Anggaran 2016 di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa adalah berdasarkan hasil temuan bahwa Program Bantuan Sosial Kementerian Pertanian sudah baik namun pada pelaksanaannya belum tepat karena masih ditemukan masalah yang mengarah pada pelanggaran akan aturan yang ada, seperti penerima bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saran yang bisa dituangkan dalam penelitian ini mengacu pada kesimpulan penelitian diatas adalah Pemerintah harus lebih memperhatikan pemohon bantuan sosial kementerian pertanian ini, terutama terkait dengan profesi dari penerima bantuan, tentunya harus sesuai dengan regulasi yang mengaturnya. Agar kebijakan ini bisa dinikmati petani yang tidak mampu yang menjadi tujuan akhir kebijakan ini.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Bansos Pertanian*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi nyata sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, penyumbang nyata Produk Domestik Bruto, penghasil devisa Negara, penyerap tenaga kerja, penyedia bahan pakan dan bio-energi dan berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya mencapai target sukses pembangunan pertanian diperlukan revitalisasi antara lain : revitalisasi lahan, revitalisasi perbenihan dan perbibitan, revitalisasi infrastruktur pertanian, revitalisasi SDM petani, revitalisasi permodalan petani, revitalisasi kelembagaan petani dan revitalisasi teknologi dan industri hilir.

Pembangunan pertanian dapat berdampak baik terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Dalam rangka mengatasi keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan teknologi pertanian, dan terbatasnya distribusi dan pasokan bahan pangan asal pertanian, maka sebagian anggaran Kementerian Pertanian dialokasikan dalam bentuk Belanja Bantuan Sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.137/Permentan/OT.140/12/2104 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016. Adapun berbagai program baik berupa uang dan atau barang dari peningkatan produktivitas, penyediaan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan penyuluhan sampai pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat di sediakan oleh pemerintah kepada para petani.

Penerima bantuan sosial yang dimaksud yaitu terdiri dari perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari

situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan minimum. Bantuan Sosial yang disediakan oleh pemerintah melalui menteri pertanian ini diperuntukkan oleh masyarakat petani. Program atau kegiatan dalam bantuan sosial ini merupakan program nasional yang dikelola baik di pusat maupun di daerah. Pemerintah daerah mengambil bagian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Secara vertikal Program – program ini adalah program Pemerintah Pusat dimana juga Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam menjalankan program ini, yakni dalam hal ini Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan, sedangkan pelaksanaan sangat tergantung pada peran Pemerintah Daerah sampai pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam terlaksananya program program ini. Para pelaksana Program di Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai pada Desa dan juga Kelurahan masih perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan memberikan kontribusi sumberdayanya agar bantuan kepada para petani lebih efektif. Melihat poin pertama dan kedua indikator keberhasilan dari penyaluran Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Anggaran Tahun 2016 yaitu 1. Diberdayakannya kelompok sasaran melalui penguatan permodalan, penyediaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pertanian serta kemampuan SDM pelaku usaha; 2. Ditanggulangnya kemiskinan kelompok sasaran dari ketidakmampuan dalam menjalankan usaha tani. Menurut Riant Nugroho (2012:122-123) Kebijakan Publik atau *Publik Policy* dalam bukunya *Publik Policy* adalah "*Any of State or Governmental (as the holder of the authority) decision to manage publik life (as the sphere) in order to reach the mission of the nation (remember, nation in consist of two institutions : state and society)*". setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik

adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masyarakat awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Berdasarkan hasil observasi sebagai pra-research yang dilakukan oleh peneliti yang berlokasi di Kelurahan Koya kecamatan Tondano Selatan, bantuan sosial yang semestinya diberikan kepada para petani diduga banyak yang jatuh pada kelompok masyarakat bukan petani, dimana banyak masyarakat bukan petani berbondong-bondong membentuk kelompok tani demi mendapatkan bantuan sosial. Selain itu terdapat juga kelompok petani yang masuk dalam kategori sejahtera yang mendapatkan bantuan sosial. Hal ini terjadi akibat kurangnya koordinasi baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa. Melihat yang terjadi di kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan berdasarkan observasi awal dari peneliti terlihat tidak sesuai dengan pedoman pengelolaan belanja bantuan sosial kementerian pertanian anggaran tahun 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
Bagaimana Implementasi Program Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

Untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.

1.4 Manfaat Penelitian

Masalah yang akan diteliti nantinya akan menjadi bekal berharga dalam mengembangkan serta menjelaskan suatu Implementasi Kebijakan itu sendiri khususnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.137 /Permentan/OT.140/12/2104 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Kebijakan publik sejauh mungkin diupayakan berada dalam rel kebijakan yang beraras pada sebesarnya kepentingan publik. Dalam ranah upaya pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi.

Menurut Dye (Hakim 2011:114) kebijakan publik adalah apa saja yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam kaitan ini kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah publik. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Kebijakan publik sejauh mungkin diupayakan berada dalam rel kebijakan yang beraras pada sebesar-besar kepentingan publik.

Menurut Lasswell dan Kaplan (Abidin 2005:20) melihat kebijakan itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebut kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek.

Selanjutnya, Chandler dan Plano (Harbani 2010:38) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

Ada 3 macam konotasi yang terkait dengan istilah kebijakan publik khususnya kata publik, yaitu : (1) pemerintah, (2) masyarakat, dan (3) umum. Yang pertama yakni dimensi subyek, ditandai oleh adanya kebijakan dari pemerintah, maka dikatakan salah satu ciri kebijakan itu ialah "*What Government do or not to do*". Dimensi yang kedua ialah

lingkungan masyarakat yang dikenai oleh kebijakan pemerintah itu. Sedangkan dimensi yang ketiga yakni sifat “umum” kebijakan itu menurut strata atau tatanan berlakunya kebijakan.

Dari ketiga penjelasan diatas dapat ditarik konsep dasar bahwa kebijakan publik itu ialah apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah baik itu dalam bentuk program sebagai sarana untuk mencapai tujuan, nilai serta praktek dalam lingkup masyarakat. Sebagaimana penjelasan dari Carl J. Friedrich (Lubis 2007:7) merinci apa-apa yang pokok dalam suatu kebijakan, yaitu adanya: a) tujuan (goal), b) sasaran (objectives) dan c) kehendak (purpose).

Sasaran utama dalam studi kebijakan publik ialah hubungan antara konsep dan penerapannya yaitu bagaimana kebijakan publik atau public policy itu proses dimulai dari awal hingga akhir sejak pengumpulan masukan (input) sehingga apa yang dihasilkan atau keluarannya (output), baik itu dari bidang keamanan, pertahanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain (William N. Dunn, Pngantar Kebijakan Publik, UGM).

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo (Pasolong 2010:57), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Implementasi pada dasarnya operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu tujuan.

Kemudian menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Solichin A. Wahab 1991:51), menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh para ahli di atas dapatlah disimpulkan bahwa implementasi kebijakan itu sesungguhnya merupakan suatu realisasi mentransformasikan rencana yang sudah diarahkan terlebih dahulu yang senyatanya sudah menjadi fokus perhatian implementasi kebijakan itu yang sudah diputuskan atau disahkan.

Menurut Riant Nugroho (2011:650) mengungkapkan ada lima prinsip-prinsip pokok dalam implementasi kebijakan publik, yaitu : Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang telah ada bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.

Tepat pelaksanaannya. Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan,

Tepat target. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya,

Tepat lingkungan, ada dua lingkungan yang paling menentukan yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal

Tepat proses, disini publik memahami kebijakan sebagai sebuah aturan main yang dipergunakan untuk masa depan, disini lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

2.3 Model Implementasi kebijakan

Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn ini sering disebut oleh para ahli “the top down approach”. Menurut Hogwood dan Gunn (dalam Abdul Wahab, 1991:57-64), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (perfect implementation) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
- 2) Tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari pada hubungan kausalitas yang handal.
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya.
- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang/kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Model ini terdiri dari 10 point yang harus diperhatikan dengan seksama agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Ada beragam sumber daya, misalnya. Waktu, keuangan, sumber daya manusia, peralatan yang harus tersedia dengan memadai. Disamping itu, sumber daya tersebut harus kombinasi berimbang. Tidak boleh terjadi ketimpangan, misalnya sumber daya manusia cukup memadai tetapi peralatan tidak memadai, atau sumber keuangan memadai tetapi ketersediaan waktu dan keterampilan tidak cukup. Hambatan lain, kondisi *eksternal* pelaksana harus dapat dikontrol agar kondusif bagi implementasi kebijakan. Ini cukup sulit sebab kondisi lingkungan sangat luas, beragam serta mempunyai karakteristik yang spesifik sehingga tidak mudah untuk dapat dikendalikan dengan baik. Misalnya sistem sosial, hal ini sangat sulit untuk dikendalikan sebab sudah sangat lama ada, tumbuh berkembang, dan sudah menjadi tradisi dan kepercayaan masyarakat. Contoh lingkungan *eksternal* lainnya yang sulit dikontrol adalah keadaan ekonomi masyarakat, dimana sangat tidak mudah untuk mengubah keadaan ekonomi masyarakat, apalagi dalam waktu dekat demi implementasi suatu kebijakan public. Teori ini juga mensyaratkan adanya komunikasi dan koordinasi sempurna. Seringkali, dalam pelaksanaan suatu kegiatan, kedua hal ini kurang mendapatkan perhatian dengan baik.

2.4 Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian.

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatnya kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.137 /Permentan/OT.140/12/2105 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementrian Pertanian, pasal 2 “pedoman pengelolaan belanja bantuan sosial sebagai dasar hukum aparat pusat dan daerah dalam pelaksanaan belanja bantuan sosial kementrian pertanian.”

Indikator keberhasilan penyaluran Belanja Bantuan Sosial mencakup indikator *output*, indikator *outcome* dan indikator *impact*. Sasaran indikator *output* dari penyaluran Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian yaitu:

1. diberdayakannya kelompok sasaran melalui penguatan permodalan, penyediaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pertanian serta kemampuan SDM pelaku usaha;
2. ditanggulangnya kemiskinan kelompok sasaran dari ketidakmampuan menjalankan usahatani; dan
3. dipulihkannya usaha tani milik petani yang terkena bencana alam.

Sasaran Indikator *outcome* dari penyaluran Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian yaitu:

1. menguatnya permodalan usaha, tersedia dan meningkatnya penggunaan prasarana dan sarana pertanian, meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kemampuan sumber daya manusia petani/pelaku usaha;
2. meningkatnya kemampuan kelompok/lembaga sasaran dalam mengatasi risiko rawan pangan dan risiko kegagalan usaha tani;
3. meningkatnya lapangan kerja dan pendapatan kelompok sasaran; dan
4. meningkatnya kemampuan kelompok/lembaga sasaran mempertahankan proses produksi pertanian pasca bencana.

Sasaran Indikator *impact* dari penyaluran Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian yaitu:

1. meningkatnya produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing produk pertanian;
2. berkembangnya usaha pertanian, tumbuhnya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan petani dan tercapainya kemandirian pangan;

Program, Kegiatan, dan Output Kegiatan Belanja Bantuan Sosial baik berupa uang dan atau barang di lingkup Kementerian Pertanian ditampung pada DIPA Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:

A. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Keegiatannya meliputi:

1. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) yaitu Pengembangan budidaya padi inbrida kawasan dan non kawasan; padi hibrida non kawasan; Pengembangan budidaya jagung hibrida kawasan dan non kawasan.

2. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan produktivitas dan luas panen melalui pelaksanaan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) yaitu pengembangan budidaya kedelai kawasan pada lahan kering, lahan sawah dan lahan pasang surut serta pengembangan budidaya kedelai non kawasan dan pengembangan budidaya kedelai non kawasan pada lahan Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP), Pengembangan Budidaya Ubikayu, Pengembangan Ubi Jalar, Pengembangan Kacang Tanah, Pengembangan Kacang Hijau dan Pengembangan Kacang Koro Pedang.

3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

Kegiatan ini untuk menumbuh-kembangkan penangkar benih tanaman pangan dalam rangka mendukung ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat melalui pemberdayaan penangkar benih tanaman pangan komoditas padi dan kedelai.

4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI

Kegiatan ini untuk mengamankan luas areal tanaman pangan dari Gangguan OPT dan DPI melalui dukungan sarana penerapan PHT skala luas padi; dukungan sarana

penerapan pht skala luas jagung; dukungan sarana penerapan PHT skala luas kedelai; dan dukungan sarana penerapan penanganan dpi padi.

5. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan

Kegiatan ini untuk mengamankan produksi tanaman pangan dari kehilangan hasil melalui dukungan sarana Pascapanen Jagung pada Non Kawasan dan Kawasan.

6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Kegiatan ini untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan melalui dukungan sarana produksi dan alsintan untuk kawasan perbatasan/ daerah tertinggal/MP3KI/ SIPP).

B. Peningkatan Produksi, dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Kegiatan ini meliputi :

1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim

Kegiatan ini untuk pengembangan tanaman tebu berupa Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD), Bongkar Ratoon, Perluasan Tebu, dan rawat ratoon.

2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar Kegiatan ini untuk Pengembangan Tanaman Teh berupa Intensifikasi Tanaman Teh dan Rehabilitasi Tanaman Teh.

3. Dukungan Perlindungan Perkebunan

Kegiatan ini untuk antisipasi dampak perubahan iklim berupa Belanja Bantuan Sosial untuk bencana alam.

C. Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

Kegiatannya adalah Peningkatan produksi benih dan bibit. Kegiatan ini untuk mencegah pemotongan sapi/kerbau betina produktif melalui penguatan sapi/kerbau betina bunting.

D. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian

Kegiatannya yaitu Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya berupa penguatan modal usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3).

E. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatannya meliputi:

1. Pengelolaan Air Irigasi Pertanian

Kegiatan ini untuk meningkatkan ketersediaan air diwilayah kelompok masyarakat/kelompok tani dan Gapoktan/(P3A) yang sering mengalami kekeringan dan atau yang belum pernah mendapatkan program bantuan dari kegiatan pengelolaan air irigasi. Bantuan yang diberikan berupa Belanja Bantuan Sosial Pengembangan Sumber Air, Konservasi dan Antisipasi Anomali Iklim, Pengembangan Jaringan Irigasi, dan Pemberdayaan Kelembagaan.

2. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan

Kegiatan ini untuk meningkatkan luas baku lahan sawah, peningkatan pemanfaatan lahan terlantar, peningkatan IP rendah pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Bantuan yang diberikan berupa Belanja Bantuan Sosial Pengembangan Optimasi Lahan, Pengembangan SRI, Perluasan Sawah Vegetasi ringan/sedang/berat, Perluasan Areal Hortikultura/Perkebunan/Peternakan dan Pengembangan Jalan Pertanian.

3. Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)

Kegiatan ini untuk kelompok tani/ Kelompok tani ternak/Gapoktan penerima bantuan pada sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan. Bantuan yang diberikan berupa Belanja Bantuan Sosial Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO).

4. Pembiayaan Pertanian

Kegiatan ini untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang di tetapkan pada desa berbasis pertanian dan diutamakan desa miskin. Bantuan yang diberikan berupa Belanja Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

5. Pengembangan Alat dan Mesin pertanian

Kegiatan ini untuk petani pemilik penggarap atau penggarap yang melaksanakan sistem pertanian modern dalam hamparan yang terkonsolidasi. Bantuan yang diberikan berupa Belanja Bantuan Sosial Pengembangan Pertanian Modern.

F. Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

Kegiatannya meliputi:

1. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Desa Replikasi READ melalui Bantuan Sosial berupa:

- a. Bantuan Modal Usaha Kelompok Padi/Jagung; Kelompok Kopi/Sawit; Kelompok Kelapa; Kelompok Sayuran/Buah; Kelompok Peternakan; dan Kelompok Non Farm Pertanian di daerah perbatasan/tertinggal;
- b. Bantuan Infrastruktur Perdesaan yang mendukung pertanian di daerah perbatasan/tertinggal.

2. Pendidikan Menengah Pertanian

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi generasi muda di bidang pertanian melalui Belanja Bantuan Sosial berupa Bantuan Praktik Siswa SMK-PP.

G. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatannya meliputi:

1. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Kegiatan ini untuk Desa P2KP/KRPL berupa Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dan Penyediaan Bibit Masyarakat.
2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Kegiatan ini untuk:

- a. Penguatan Lembaga Usaha/Distribusi Pangan Masyarakat; dan
- b. Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat melalui Penyediaan Bahan Pangan.

3. Pengembangan Ketersediaan dan Penganan Rawan Pangan

Kegiatan ini untuk pengembangan kawasan mandiri pangan reguler dan Kawasan Mandiri Pangan Kepulauan, Papua-Papua Barat serta Kawasan Perbatasan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, ketersediaan pangan, dan daya beli serta akses rumah tangga untuk memenuhi kecukupan gizi keluarga.

4. Dukungan Manajemen Teknis dan Lainnya

Kegiatan ini ditujukan pada *Matching Fund*/kesesuaian pendanaan kepada Kelompok Mandiri dan Terbangunnya Sarana dan Prasarana Produktif Pedesaan Skala Kecil melalui Pembangunan Prasarana/Infrastruktur desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena dengan penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah juga lebih menekankan pada proses pencarian makna, pengungkapan makna, dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan tujuan agar masalah yang akan dikaji lebih mendalam, dan apa adanya serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti terhadap fakta yang muncul.

Metode penelitian Kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (Sugiyono 2007 : 8). Suatu jenis penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan objek studi atau dengan kata lain dalam penelitian sangat diperlukan jenis penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian dengan maksud agar diperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pada penelitian nantinya, akan digunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Pengertian metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau dalam kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir,2011:12). Dengan demikian penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran tentang Implementasi Program Bantuan Sosial Kementrian Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah penelitian dan kedudukan fokus bersifat sementara, karena dapat berubah pada saat penelitian dilakukan. Dikatakan sebagai fokus sementara sebab awalnya masih umum dan samar-samar, akan bertambah jelas dan mendapat fokus setelah peneliti berada di lapangan (Bogdan, 2011:83). Adapun fokus penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Program Belanja Bantuan Sosial Kementrian Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, dengan Operational Theory menggunakan konsep Riant Nugroho (1) apakah kebijakannya sendiri sudah tepat, (2) tepat pelaksanaannya, (3) tepat target, (4) tepat lingkungan, (5) tepat proses.

3.3. Lokasi Penelitian

Dalam penentuan lokasi ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan oleh peneliti, dalam hubungan ini (Moleong, 2011:31) berpendapat bahwa, cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertahankan teori substantif; pergi dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang berada di lapangan. Keterbatasan geografi, waktu, tenaga perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Berdasarkan acuan tersebut di atas, maka penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.

3.4. Sumber Data

Menurut Sugiono (2007 : 225) terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Sesuai dengan masalah dan fokus penelitian ini, maka sumber data adalah sebagai berikut :

1. Informan, sebagai informan awal yang dipilih secara purposif (purposive sampling). Hal ini dimaksudkan untuk memilih informan yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian sehingga data yang diperoleh dapat dipergunakan untuk membangun kesimpulan.
2. Tempat dan peristiwa. Dimaksudkan di sini adalah tempat di mana peneliti memperoleh data. Dengan mengadakan pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang muncul di lapangan. Dari hasil pengamatan ini merupakan bahan yang akan dikemukakan pada teknik pengumpulan data. Tempat dan Peristiwanya di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.
3. Dokumen yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian, seperti Data Kelompok Tani yang ada di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, Pasolong (2012:162) mengemukakan dalam mengumpulkan data peneliti harus terjun sendiri kelapangan secara aktif.

Proses pengumpulan data ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Proses memasuki lokasi penelitian

Peneliti mendatangi lokasi penelitian untuk melaporkan tentang rencana lokasi penelitian sekaligus untuk mendapat ijin/rekomendasi, dengan menunjukkan surat pengantar penelitian.

2. Ketika berada di lokasi penelitian

Dalam tahap ini peneliti berusaha melakukan pendekatan secara formal maupun informal dengan subjek penelitian. Dalam proses ini peneliti berusaha untuk memperoleh informasi selengkapnyanya serta menangkap intisiasi dari berbagai informasi yang diperoleh tersebut sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan.

3. Mengumpulkan data

Pada tahap ini peneliti mengemukakan dua teknik pengumpulan data yaitu : a). Wawancara, b). Dokumentasi.

3.6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisis data dilapangan model Miles dan Heberman. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2007 : 246), mengemukakan bahwa

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema dan polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung diadakan tahap reduksi data selanjutnya dengan jalan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat kategorisasi data.

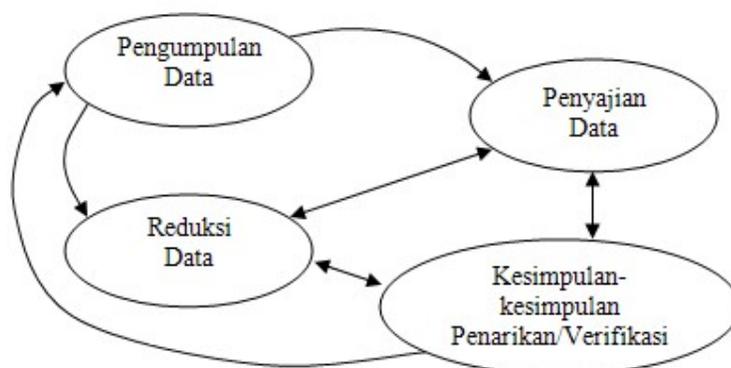
2. Penyajian data

Penyajian data atau display data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

3. Menarik kesimpulan

Verifikasi dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded”. Dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Komponen-komponen analisis data

tersebut di atas oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2007) digambarkan sebagai berikut :



Gambar : Analisis Model Interaktif

3.7. Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2007) yang dalam pemeriksaan data menggunakan empat kriteria yaitu :

1. Derajat Kepercayaan

Penerapan konsep kriteria derajat kepercayaan dimaksudkan sebagai pengganti konsep validitas internal dari penelitian Non-Kualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk:

- a. Melaksanakan inquiri sedemikian rupa, sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat tercapai.
- b. Mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Beberapa cara yang perlu diupayakan agar hasil penelitian dapat dipercaya, antara lain :

- (1) Pengamatan yang terus menerus. Dengan pengamatan yang terus menerus, peneliti dapat memperhatikan sesuatu secara lebih cermat khususnya yang berkaitan dengan fokus penelitian
- (2) Mengumpulkan bahan referensi. Sebagai bahan referensi untuk meningkatkan kepercayaan dan kebenaran data dapat digunakan hasil rekaman tape recorder atau bahan dokumentasi.
- (3) Mengadakan member check. Pada akhir wawancara peneliti akan melakukan member check atau mengecek ulang secara garis besar berbagai hal yang telah disampaikan oleh informan berdasarkan catatan lapangan dengan maksud agar informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan laporan penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan.

2. Keteralihan (Transferability)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima. Untuk melaksanakan keteralihan tersebut maka peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama, dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Dalam hal ini peneliti berusaha memberikan deskripsi yang terinci tentang bagaimana hasil penelitian bisa dicapai, apakah hasil penelitian itu dapat diterapkan, akan diserahkan pada para pembaca atau pemakai. Bila pemakai melihat dalam penelitian ini ada sesuatu yang cocok bagi situasi yang dihadapinya maka bisa dimungkinkan adanya suatu keterlibatan.

2. Ketergantungan (Dependability) dan Kepastian (Confirmability)

Ketergantungan menurut istilah konvensional disebut dengan reliabilitas (reliability). Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas, hanya dengan alat yang reliabel maka akan dapat diperoleh data yang valid. Alat utama penelitian ini adalah peneliti sendiri dan

pembimbing, oleh karena itu untuk menjamin ketergantungan dan kepastian penelitian maka yang perlu dilakukan adalah memadukan kriteria ketergantungan dengan kepastian dengan cara “audit trail” (memeriksa dan melacak suatu kebenaran).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa

Residen Inggris Thomas Nelson konon adalah orang yang pertama membangun Kota Tondano sekarang ini. Ia disebut memindahkan Tondano ke hilir dari pulau delta Minawanua, pemukiman awal Tondano, yang sebelumnya dihancurkan Belanda setelah terjadi Perang Minahasa di Tondano 1808-1809. Penduduk yang bercerai-berai bersembunyi di pengungsian dikumpulkan dibawah pimpinan Jacob Supit. Meniru pemukiman awal di Minawanua, maka dengan pembatas sungai Manado (sungai Tondano) negeri Tondano baru ini dibangun dan terbagi dua bagian. Sebelah barat sungainya bernama Touliang (Tondano-Touliang), dan kawasan sebelah timur bernama Toulimambot (Tondano-Toulimambot).

Jacob Supit van Tanawangko adalah keturunan dari Pacat Supit Sahiri Macex, Hukum Mayoer Kepala dari Tombariri, yang sempat memerintah Tondano di Minawanua. Supit Sahiri memang banyak memiliki istri. Selain istri resmi yang disebut bernama Laya, Suanen dan Woki Konda, ia pun mengambil sejumlah istri lain. Dari Tondano pun ia memperistri Riri serta Wair (Waar), dan Jacob Supit ini turun dari Riri. Mayoer Jacob Supit kelak menurunkan para penguasa keturunan Supit di Tondano-Toulimambot, lewat Werias yang dikenal dengan nama Hendrik Supit, serta cucu mantunya Alexander Kawilarang. Hampir seabad pemerintahan di Toulimambot silih berganti di tangan keluarga Supit dan Kawilarang.

Pada Tahun 1750 Tondano dihadiskan pecah 2 balak, yakni Balak Tondano-Toulimambot dan Tondano-Touliang dan pada tahun 1917 Tondano-Touliang dan Tondano-Toulimambot digabung menjadi satu distrik Tondano. Negeri-negeri Distrik

Tondano-Touliang yaitu Wewelen, Watulambot, Rerewokan, Wawalintowan, Tounkuramber, Rinegetan, Tuutu, Roong, Koya, Tataaran serta negeri-negeri di pinggir danau Tondano seperti Tandengan, Eris, Telap. Kemudian negeri-negeri di pantai Tondano yaitu Watulaney, Kayuroya dan Kapataran. Semua negeribaru yakni Marawas disebelah timur dari Kampung Jawa.

Koya pada awalnya hanya merupakan rawa-rawa namun dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya penduduk di distrik Tondano-Touliang, masyarakat mulai menimbun kemudian membuat rumah rumah untuk ditinggali, Seiring berjalannya waktu terjadi pemekaran sehingga timbulnya desa Koya.

Table 4.1 Kelembagaan Kelurahan Koya

Perangkat Kelurahan
Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
PKK

Sumber : Lurah Kelurahan Koya

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi Program Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti mengemukakan dua teknik pengumpulan data yaitu : a). Wawancara, b). Dokumentasi, untuk memberikan kebebasan kepada informan untuk memberikan informasi terkait permasalahan penelitian.

Operational Theory yang dijadikan sebagai landasan pisau analisis peneliti menggunakan landasan teoritis, yakni konsep dari Riant Nugroho dengan 5 indikator yaitu, 1). Apakah Kebijakannya sendiri sudah tepat 2). Tepat pelaksana 3). Tepat target 4). Tepat lingkungan 5). Tepat proses.

Dari kajian data primer informan yang didapat maka disimpulkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial kementerian pertanian tahun anggaran 2016 pelaksanaannya tidak sesuai dengan pedoman pengelolaan belanja bantuan sosial Kementerian Pertanian, mulai dari mekanisme dalam penerimaan bantuan sosial yang tidak dilaksanakan sebaik-baiknya sampai pada tahap pelaksanaannya.

Tepat pelaksanaannya adalah indikator yang kedua dalam penelitian ini, Aktor implementasi kebijakan tidak hanyalah pemerintah. Ada tiga lembaga yang menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan, berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan program bantuan belanja sosial tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut. Dilihat dari berkas – berkas yang dimasukan merupakan berkas yang

tidak sesuai sampai pada penyaluran bantuan yang tidak betul-betul diawasi. Implementasi Program Nasional yang berbasis pelayanan masyarakat lebih khusus kepada masyarakat yang kurang mampu, keterlibatan pemerintah dalam hal ini melalui dinas pertanian sangat berpengaruh agar tujuan dapat tercapai. Profesionalitas kerja dari aparat pelaksana kebijakan adalah salah satu aspek pendukung dalam mengurus dan melayani kebutuhan masyarakat. Karena dari hasil temuan peneliti di lapangan menemukan bahwa, kurangnya profesionalitas dari para aparat pelaksana berdampak kepada pencapaian tujuan dari bantuan sosial tersebut. Yaitu dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian pedoman belanja bantuan sosial bertujuan untuk: 1. mempercepat penyaluran anggaran agar distribusi dan pasokan bahan pangan asal pertanian lebih lancar; 2. mengelola Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian secara tertib, efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Dengan kurangnya profesionalitas aparat pelaksana pengelolaan bantuan sosial ini menjadi kurang efektif.

Sementara itu, untuk indikator ketiga terkait dengan tepat target, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan "CL" selaku Kepala Kepala seksi sarana produksi tanaman pangan Dinas Pertanian dengan pertanyaan dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian apakah telah sesuai dengan targetnya yaitu kepada petani yang tidak dapat menjalankan usaha taninya. jika melihat peraturan yang ada, program ini diperuntukan untuk masyarakat petani, dari dinas pertanian juga berusaha agar bantuan ini terlaksana 100%, bekerja sama dengan BP4K dalam merekomendasikan penerima bantuan sosial ini, setiap usulan dari setiap BP4K setiap kecamatan merupakan kelompok tani yang bersertifikat. Program bantuan sosial kementerian pertanian tahun anggaran 2016 belum tepat sasaran terlihat dari banyaknya bukan petani yang mengikuti program ini dan para petani sejahtera yang mengikuti program ini.

Tepat target adalah indikator ke tiga dalam penelitian ini. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Menurut hasil wawancara diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa program bantuan sosial ini belum tepat sasaran terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak berprofesi sebagai petani yang mengikuti program ini dan para petani yang masuk dalam kategori sejahtera yang menerima bantuan ini. Hal dikarenakan tidak tertibnya administrasi serta, karena adanya melibatkan hubungan kekeluargaan dalam pelaksanaan program bantuan sosial ini , sehingga para petani yang berhak menerima bantuan tapi tidak mengajukan permohonan dikarenakan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan aparat pelaksana.

Sementara itu, untuk indikator keempat terkait dengan tepat lingkungan, ditemukan bahwa Program Bantuan Sosial Kementerian Pertanian mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat karena mereka berpendapat masyarakat memang memerlukan bantuan dari pemerintah dan sudah sewajarnya pemerintah membuat program yang membangun masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan maksud dan tujuan dari kebijakan ini.

Sementara itu, untuk indikator kelima terkait dengan tepat proses ditemukan bahwa masyarakat di kelurahan Koya sebagian besar tidak memahami akan program bantuan sosial ini. Karena temuan peneliti di lapangan, sosialisasi yang dilaksanakan tidak sungguh sungguh hanya sekedar formalitas, akibatnya masyarakat kurang memahami tujuan dari program ini, syarat syarat untuk menerima program ini.

Dari kajian data primer informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal tepat proses dimana seharusnya public (masyarakat) memahami kebijakan dalam implementasi kebijakan bantuan sosial kementerian pertanian sebagai sebuah aturan, tetapi dalam praktek yang terjadi di lapangan dimana masyarakat sebenarnya tidak mengerti ketentuan yang berlaku dalam hal kepengurusan program ini. Karena masyarakat dalam kepengurusannya tidak mengikuti ketentuan. Selain itu aparat pelaksana seharusnya memahami kebijakan proyek ini sebagai suatu tugas yang harus dilaksanakan. Seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 137/permentan/OT.140/12/2015 pasal 2 yaitu pedoman belanja bantuan sosial kementerian pertanian merupakan dasar hukum aparat pusat dan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan belanja bantuan sosial kementerian pertanian. Karena implementasi kebijakan ini dikhususkan kepada petani yang kurang mampu, dengan tujuan dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Apabila pelaksanaan kebijakan dalam hal ini adalah Dinas Pertanian dan BP4K tidak memahami tugasnya bila peneliti mengkorelasikan konsep tepat proses dari Riant Nugroho (2011) dapat diketahui sudah sejauh mana pemahaman kebijakan sebagai tugas yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan belum berjalan sebagaimana mestinya. Koordinasi kerja antara perangkat kerja dan instansi terkait yang kurang, membuktikan bahwa pelaksana kebijakan di kelurahan belum memahami benar tugas yang harus dilaksanakan.

Tepat proses, adalah indikator ke lima dalam penelitian ini. tepat proses, disini publik memahami kebijakan sebagai sebuah aturan main yang dipergunakan untuk masa depan, disini lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Tujuan dari Bantuan Sosial Kementerian Pertanian adalah untuk membantu petani yang kurang mampu dalam mengusahakan usaha taninya. Dengan tujuan itu sudah seharusnya pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah Dinas Pertanian dan BP4K serta TNI mengerti dan memahami bahwa program ini untuk mensejahterakan masyarakat sesuai

dengan tujuan Negara. Namun masih adanya masyarakat petani yang seharusnya menerima bantuan ini, tetapi tidak bisa berpartisipasi karena konsistensi dari pelaksana kebijakan dalam bekerja belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegagalan dalam suatu kebijakan akan berdampak pada masyarakat yang menjadi prioritas program tersebut.

4.3 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.3.1 Implementasi Program Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa

Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional, sehingga membuat pemerintah selaku penyelenggara negara mengupayakan terlaksananya program-program Nasional sebagai kewajiban pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara yang salah satunya mensejahterakan rakyat, dan sebagai wujud implementasi pemerintahan yang baik (*good governance*). Pembangunan Nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Tujuan pembangunan Nasional adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

Pembangunan pertanian dapat berdampak baik terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Dalam pembangunan dibutuhkan masyarakat yang mempunyai orientasi saling bergantung. Terlaksananya kebijakan pemerintah dalam implementasi program nasional tidak terlepas dari peran masyarakat dalam wujud partisipasi untuk mendukung jalannya program yang ditetapkan.

Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan Nasional bisa mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui perencanaan yang dirumuskan kegiatan pembangunan secara efisien dan efektif yang dapat memberikan hasil optimal dalam implementasi suatu program Nasional.

Implementasi kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program Nasional dapat terlaksana apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah desa/kelurahan dapat bekerja sama dalam mendukung terselenggaranya program yang dijalankan. Penyebab kegagalan program-program Nasional yang dijalankan pemerintah pusat selain karena masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang menjadi faktor utama kegagalan berbagai program Nasional yang dilaksanakan pemerintah pusat adalah terjadinya kecenderungan untuk penyeragaman kebijakan, lemahnya dukungan pemerintah daerah dan rendahnya pengetahuan kelompok sasaran terhadap berbagai program yang diimplementasikan.

Program Bantuan Sosial Kementerian Pertanian merupakan salah satu program pemerintah yang dikeluarkan untuk membantu para petani, dalam hal ini agar petani yang mengalami risiko sosial keterbatasan modal agar mampu mengusahakan lahan yang dikerjakannya, sumber anggaran pelaksanaan kegiatan bantuan sosial ini adalah dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**.

Dalam rangka mengatasi keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan diseminasi teknologi pertanian, lemahnya regenerasi petani muda pedesaan, dan terbatasnya distribusi dan pasokan bahan pangan asal pertanian, maka sebagian anggaran Kementerian Pertanian dialokasikan dalam bentuk Belanja Bantuan Sosial untuk pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana dibidang

pertanian. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 137/permentan/OT.140/12/2015 tentang Pedoman Belanja Bantuan Sosial.

Penyaluran bantuan sosial dibidang pertanian diselenggarakan hendaknya memperhatikan prinsip bahwa pertanian secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berperan secara jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan belanja bantuan sosial di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Terlaksananya Program Bantuan Sosial Kementerian Pertanian berarti terlaksanya hubungan pemerintah pusat dan daerah yang dimana pemerintah daerah memiliki peranan dalam mendukung terlaksananya program Nasional yang dijalankan.

Menurut Nugroho (2012:122-123) Kebijakan Publik atau *Publik Policy* dalam bukunya *Publik Policy* adalah "*Any of State or Governmental (as the holder of the authority) decision to manage publik life (as the sphere) in order to reach the mission of the nation (remember, nation in consist of two institutions : state and society)*". setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masyarakat awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Pada penelitian ini mengenai Implementasi Program Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian menggunakan operational theory menurut Riant Nugroho (2011 : 650) mengungkapkan ada lima prinsip-prinsip pokok dalam implementasi kebijakan publik yaitu:

Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang telah ada bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan

Tepat pelaksanaannya. Aktor implementasi kebijakan tidak hanyalah pemerintah. Ada tiga lembaga yang menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan,

Tepat target. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya,

Tepat lingkungan, ada dua lingkungan yang paling menentukan yaitu lingkungan kebijakan dalam artian interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Yang kedua lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari *publik opinion* yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institusion* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Dan *individudual* yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Tepat proses, disini publik memahami kebijakan sebagai sebuah aturan main yang dipergunakan untuk masa depan, disisi lain pemerintahh memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan untuk diinterpretasikan mengenai tepat kebijakannya sesuai dengan data dengan mengadopsi konsep dari Riant Nugroho yakni :

Indikator pertama: Apakah Program Bantuan Sosial Kementerian Pertanian sudah tepat, maka dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa program ini dibutuhkan oleh masyarakat Kelurahan Koya terlihat dari masih banyaknya jumlah petani yang tidak mampu mengusahakan usaha taninya, namun dapat dilihat bahwa pemerintah hanya sekedar menjalankan program saja, tidak sungguh-sungguh dan berupaya membantu masyarakat terlihat dari banyaknya penerima bantuan sosial ini bukan berprofesi sebagai petani dan petani petani yang mampu, hal dikarenakan masyarakat yang belum memahami kebijakan ini dan pemerintah yang tidak serius dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Kementerian Pertanian karena berdasarkan jawaban dari para informan mengenai tujuan dari program ini masyarakat hanya menjelaskan bahwa program ini diperuntukan untuk para petani saja mereka tidak memahami persyaratan yang diberlakukan diantaranya diperuntukan petani yang mengalami resiko sosial dan tidak mampu menjalankan usaha taninya. Sedangkan dari pihak pemerintah yang ketika diwawancarai mengaku memahami akan kebijakan ini, pada kenyataannya dilapangan tidak sesuai.

Indikator kedua: Apakah Program Bantuan Sosial Kementerian Pertanian sudah tepat pelaksanaan, maka dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program bantuan sosial ini secara administratif telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun yang menjadi kendala masih didapati adanya berkas yang yang tidak sesuai yang dimasukkan oleh masyarakat, dan pemerintah tidak sungguh sungguh dalam pengendalian dalam penyaluran bantuan. Dari hasil temuan peneliti dilapangan menemukan bahwa, kurangnya profesionalitas kerja pemerintah dalam hal ini dinas pertanian dengan lembaga-lembaga yang terkait yang berdampak kepada masyarakat yang ada dikelurahan Koya. Mengakibatkan masyarakat yang tidak memenuhi syarat menerima bantuan sedangkan yang membutuhkan bantuan yakni petani miskin tidak terjangkau oleh kebijakan ini.

Indikator ketiga: Apakah Program Bantuan Sosial Kementerian Pertanian sudah tepat target, bahwa program ini belum tepat sasaran terlihat dari sedikitnya petani kurang mampu yang mengikuti program ini dikarenakan para petani miskin ini tidak memahami mengenai kebijakan ini, peneliti juga menemukan dilapangan bahwa sebagian besar penerima bantuan ini merupakan masyarakat bukan berprofesi petani dan juga masyarakat petani yang mampu mengusahakan lahan pertaniannya tanpa bantuan sosial kementerian pertanian ini. Penyaluran bantuan sosial ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sudah tidak sesuai dengan tujuan dari Implementasi Kebijakan tersebut. Sehingga dari sub fokus ini secara konseptual dapat dikatakan bahwa adanya target yang belum sesuai dengan sasaran dari Bantuan sosial di bidang pertanian yang seharusnya diperuntukan bagi petani yang tergolong tidak mampu, Belum sesuai dengan tertib administrasi yang dimana masih terdapat berkas yang tidak sesuai serta tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah yakni petugas lapangan yang ditugaskan untuk memeriksa pernyataan dari pemohon bantuan.

Indikator keempat: Apakah Program Bantuan Sosial Kementerian Pertanian sudah tepat lingkungan, terlihat bahwa program ini telah dikerjakan secara bersama-sama baik pemerintah desa maupun pihak BP4K dan TNI, dalam konsep tepat lingkungan telah berjalan sesuai dengan dua lingkungan yang paling menentukan yaitu lingkungan kebijakan dalam artian interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Ini dapat dilihat dari Pemerintah (Pusat) sebagai perumus bersama dengan Dinas Pertanian, serta lembaga – lembaga yang terkait kerja sama yaitu BP4K dan TNI sebagai pelaksana kebijakan tersebut telah tepat lingkungan yang dibuktikan dengan bantuan yang sampai kepada pemohon bantuan. Yang kedua lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari *publik opinion* yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institution* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan

kebijakan dan implementasi kebijakan. Dan *individual* yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Peneliti menemukan dilapangan respon masyarakat yang baik akan adanya bantuan sosial dari pemerintah dibidang pertanian. Masyarakat baik petani maupun bukan petani mendukung akan program yang dikeluarkan ini. Namun para petani mengharapkan program ini dapat dilaksanakan sesuai maksud dan tujuan.

Indikator kelima: Apakah Program Bantuan Sosial Kementerian Pertanian sudah tepat proses, terlihat bahwa dalam pelaksanaan Program ini masih adanya petani yang seharusnya menerima bantuan ini, tetapi tidak bisa berpartisipasi kerana konsistensi dari pelaksana kebijakan dalam bekerja belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat serta petani tidak memahami aturan main dari kebijakan bantuan sosial ini. Kegagalan dalam suatu kebijakan akan berdampak pada masyarakat yang menjadi prioritas program tersebut, Kebijakan haruslah sesuai dengan aturan mainnya karena Pemerintah adalah Fasilitator masyarakat dan sudah seharusnya program ini tepat sasaran menyentuh lapisan masyarakat yang tergolong kurang mampu.

Kesimpulan akhir pada fokus ini menunjukkan bahwa yang paling menonjol adalah pada ketepatan pelaksanaan , ketepatan target, dan ketepatan proses dengan merekonstruksi teori operasional Riant Nugroho sebagai pisau analisis pada penelitian ini yakni ketika Implementasi Program Bantuan Sosial di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Misnahasa akan tercapai dengan baik jika memperhatikan V (lima) indikator yaitu: tepat kebijakannya, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses. Sehingga jika dalam pelaksanaan kebijakan ini memperhatikan lima indikator tersebut, maka akan menghasilkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan yang dirumuskan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Merujuk dari data penelitian yang sudah dianalisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Maka didapatkan beberapa kesimpulan yang mampu dituangkan pada penelitian Implementasi Program Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun Anggaran 2016 di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, antara lain :

Berdasarkan hasil temuan bahwa Program Bantuan Sosial Kementerian Pertanian sudah baik namun pada pelaksanaannya belum tepat karena masih ditemukan masalah yang mengarah pada pelanggaran akan aturan yang ada, seperti penerima bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.2 Saran

Beberapa Saran yang bisa dituangkan dalam penelitian ini mengacu pada kesimpulan penelitian diatas diantaranya adalah:

Pemerintah harus lebih memperhatikan pemohon bantuan sosial kementerian pertanian ini, terutama terkait dengan profesi dari penerima bantuan, tentunya harus sesuai dengan regulasi yang mengaturnya. Agar kebijakan ini bisa dinikmati petani yang tidak mampu yang menjadi tujuan akhir kebijakan ini. Fasilitator masyarakat dalam hal ini pemerintah harus lebih profesional dalam mengemban tugas yang ada, terutama saat menerima setiap berkas dari masyarakat yang ada. Melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan pedoman yang telah diatur. Pemerintah harus bekerja dengan konsisten terkait kebijakan ini, agar nantinya target yang diinginkan oleh

pemerintah pusat dalam kebijakan ini bisa tercapai dengan baik, dan sesuai dengan kebutuhan para petani.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal, 2005. *Kebijakan Publik (Edisi Revisi Cetakan Ketiga)*. Jakarta: Suara Bebas

Hakim, Lukman, 2011. *Pengantar Administrasi*. Yogyakarta : AR-Ruzz Media

Indihono, Dwiyanto, 2009. *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gava Media

Lubis, Solly, 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Mandar Maju

Moleong, Lexy 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

M. Nazir, 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta; PT. Ghalia Indonesia

Nugroho, Riant, 2011. *Public Policy*. Jakarta : Elex Media Komputindo

Nugroho, Iwan. Dan R. Dahuri. 2012. *Pembangunan Wilayah*. Jakarta : LP3ES Anggota Ikapi

Pasolong, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta

Wahab, A. Solichin, 1991. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta : Bumi Aksara

Sumber Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Menteri Pertanian RI No.137 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016.

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

6.1 Anggaran Biaya

No	Komponen	Biaya yang diusulkan
1	Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, honor operator, dan honor pembuat sistem (maksimum 30% dan dibayarkan sesuai ketentuan) Gaji dan Upah	5.000.000
2	Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, penjilidan laporan, publikasi, pulsa, internet, bahan laboratorium, langganan jurnal (maksimum 60%)	5.000.000
3	Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, biaya akomodasi/konsumsi, perdiem/lumpsum, transport (maksimum 40%)	5.000.000
4	Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium, kendaraan, peralatan penunjang penelitian lainnya (maksimum 40%)	5.000.000
	Jumlah	20.000.000

Untuk rinciana biaya kegiatan akan kami jabarkan pada table berikut :

1. Honorarium				
Honor	Honor/jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor per penelitian (Rp)
Pelaksana	60.000	5	20	5.000.000
Sub Total Rp 5.000.000				
2. Bahan Habis Pakai dan Peralatan				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Harga peralatan penunjang
LCD Projector (sewa)	Presentasi tentang materi	1	100.000 x 10	1.000.000
Printer (sewa)	Mencetak	1	1.000.000	1.000.000
Laptop (sewa)	Memproses materi penelitian	5	250.000	1.000.000
Sub Total Rp. 3.000.000				
Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Harga peralatan penunjang
Kertas HVS A4 70 gr	Pembuatan prototype model dan modul	5 rim	40.000	200.000
Kertas bergaris	Mencatat hasil studi lapang	2 rim	50.000	100.000
Catridge color & black	Mencetak	4 buah	200.000	800.000
USB Flash Disk	Menyimpan data	3 buah	100.000	300.000
Ball point	Mencatat /menulis	1 dos	100.000	100.000
Spidol / white board marker	Menulis	5 buah	20.000	100.000
Amplop tebal	Penyimpanan data Instrumen	20 lbr	100.000	100.000
Penggaris baja	Menggaris	2 buah	25.000	50.000
Paper clips	Mengelip	5 dos	10.000	50.000
Payung	Tidak basah	4 buah	50.000	200.000
Sub Total Rp 2.000.000				
4.Perjalanan				
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Biaya Kunjungan (Rp)
Kunjungan ke Lokasi Penelitian	Diskusi tahap I	2x1	150.000	300.000
Kunjungan ke Lokasi Penelitian	Identifikasi masalah	2x1	150.000	300.000
Kunjungan ke Lokasi Penelitian	Pelaksanaan kegiatan	4x1	150.000	600.000

Kunjungan ke Lokasi Penelitian	Uji coba draft	4x1	150.000	600.000
Kunjungan ke Lokasi Penelitian	Diskusi tahap II	2x1	150.000	300.000
Kunjungan ke Lokasi Penelitian	Dokumentasi dan Identifikasi	4x1	150.000	600.000
Kunjungan ke Lokasi Penelitian	Wawancara Perampungan Hasil	4x3	150.000	1.800.000
Biaya foto copy/jilid	Implementasi	10 x	50.000	500.000
Sub Total			Rp	5.000.000
4.Lain – lain				
Kegiatan	Justifikasi	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Biaya per- (Rp)
Sub Total			5.000.000,-	
TOTAL Biaya			(RP)	25.000.000